

EVALUASI PENYAJIAN PELAPORAN AKTIVA TETAP UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH

EVALUATE THE REPORTING OF FIXED ASSETS FOR IMPROVING GOVERNMENT INSTITUTIONS SUPERVISION

Meity Handayani

Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No.132 Jakpus, Telp: 021- 3101953
e-mail: meityhandayani@yahoo.co.uk

Diterima: 18 Agustus 2013; direvisi: 23 Agustus 2013; disetujui: 18 September 2013

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan penyajian pelaporan aktiva tetap yang telah ada di Pemerintah, kemudian mendeskripsikan factor-faktor yang paling berpengaruh dalam pelaporan aktiva tetap, serta membangun penyajian pelaporan alternatif yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi (telaah dokumen) dari sumber media cetak dan elektronik dan Observasi (pengamatan langsung). Hasil analisis penelitian menunjukkan: laporan aktiva tetap yang dibuat saat ini adalah laporan yang dihasilkan dari system yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, system tersebut bernama SIMAK. Akan tetapi sejauh ini system tersebut belum mengakomodir keinginan pemeriksa. System tersebut juga tidak mencantumkan keterangan mengenai biaya penyusutan, perhitungan biaya penyusutan hanyamengandalkan perhitungan dari DJKN (Ditjen Kekayaan Negara). Biaya penyusutan sangat penting pengungkapannya, karena kedepan Pemerintah diwajibkan untuk mengikuti PP no. 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual dan merupakan dasar penghapusan aktiva guna mewujudkan tertib pencatatan dan pengelolaan aktiva tetap.

Kata kunci: Evaluasi, laporan, akunting, asset tetap, akrual

Abstract

This study aims to evaluate the weaknesses of evaluate the reporting of fixed assets that already exist in the Government, then describes the factors that most influence the reporting of fixed assets, as well as building an ideal alternative to improve the supervision of government institutions. This study uses descriptive with qualitative approach. Data collection was performed by the study of documents method from print and electronic sources and Direct Observation. The analysis resulted: fixed asset reports are made at this time is a report generated from the system created by the Ministry of Finance, the system is called SIMAK. But so far the system has not accommodate the examiner. The system also does not include information on the cost of depreciation, depreciation calculations rely on the calculation of DJKN (Directorate General of State Property). Disclosure of the cost of depreciation is very important, because the next Government is obliged ti follow the PP no.71 tahun 2010 about accrual accounting base and is the basis for asset in order to achieve the orderly recording and management of fixed assets.

Keywords: evaluation, report, accounting, fixed assets, accrual

PENDAHULUAN

Situasi masyarakat yang kian dinamis dan kritis akan isu keuangan tersebut, memerlukan kecepatan dan keakuratan suatu informasi atas laporan keuangan yang optimal, jujur, transparan dan dapat di pertanggungjawaban, agar tidak mencederai harapan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan mereka kepada pemerintah. Dalam memberikan keyakinan atas suatu laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah maka idealnya diperlukan pemeriksaan dan opini dari pihak ketiga (auditor) dalam penilaiannya. Untuk itu laporan keuangan

yang disusun oleh Pemerintah diaudit oleh auditor yang terdiri dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal bahkan Akuntan Publik.

Pada mulanya laporan bagi suatu pemerintah hanyalah sebagai “alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar kepercayaan masyarakat, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keputusan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh sebagian besar laporan keuangan yang tidak wajar tersebut

terdapat dalam pelaporan aktiva tetap. Seperti diketahui bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional/kegiatan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Laporan aktiva tetap merupakan suatu alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi aktiva tetap dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Laporan aktiva tetap biasanya mengungkap penambahan aktiva, pengurangan aktiva dan posisi serta nilai aktiva saat ini (Standar Akuntansi Pemerintahan). Dalam hal ini analisa rasio dapat dipakai dalam memberikan gambaran keadaan aktiva tetap yang sebenarnya mengenai sehat tidaknya pemerintah melakukan program kerjanya.

Berdasarkan gambaran penyajian laporan aktiva tetap untuk meningkatkan performa laporan keuangan maka penelitian ini sangat penting untuk segera diteliti.

Dengan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penyajian pelaporan aktiva tetap yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam pelaporan aktiva tetap, (2) Membangun *alternative* penyajian pelaporan aktiva tetap yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis: (1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi pengembangan studi pendidikan yang berkaitan dengan pelaporan aktiva tetap dalam kelembagaan pemerintah, (2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi alternatif yang dapat digunakan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka efisien dan efektif terkait dengan penyajian pelaporan aktiva tetap yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah.

Kewajiban menjaga kompetensi dan profesionalitas dalam menyusun laporan keuangan adalah bersifat mutlak dan melekat sepanjang terdapat kegiatan yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah: (1) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, (2) SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara, (3) SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain tujuan di atas, Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk : (1) Akuntabilitas ; mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan, (2) Manajemen ; memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, (3) Transparansi ; memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders, (4) Keseimbangan Antargenerasi ; memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.

Masa manfaat adalah: (1) periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan; atau (2) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai sisa adalah jumlah *netto* yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN Masukan Tak Boleh Restitusi (*non-refundable*), dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Manfaat keekonomian yang diwujudkan dalam suatu pos aktiva tetap dikonsumsi oleh perusahaan sepanjang masa manfaat aktiva. Tetapi, faktor lain seperti keusangan teknis dan aus serta rusak (*wear and tear*) saat suatu aktiva menganggur (*idle*), juga

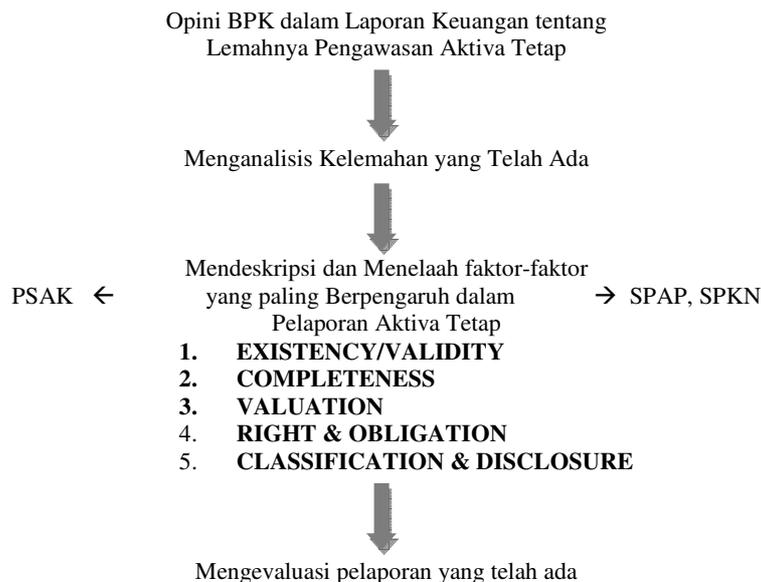
dapat mengurangi manfaat keekonomiannya yang mungkin telah diharapkan tersedia dari aktiva.

Tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi, walaupun diperoleh secara sekaligus. Tanah biasanya memiliki usia tak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan. Bangunan memiliki usia terbatas, oleh karena itu disusutkan. Peningkatan nilai tanah tempat bangunan didirikan tidak mempengaruhi masa manfaat bangunan.

Kebijakan perbaikan dan perawatan perusahaan juga dapat mempengaruhi masa manfaat suatu aktiva. Kebijakan dapat menghasilkan suatu perpanjangan masa manfaat aktiva atau suatu peningkatan dalam nilai sisanya. Tetapi, penggunaan kebijakan tersebut tidak meniadakan kebutuhan untuk membebaskan penyusutan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Kriteria dari aktiva tetap adalah:

1. Existency/Validity



Skema 1. Alur kerja evaluasi laporan keuangan tentang lemahnya pengawasan aktiva tetap.

Tabel 1. Identifikasi Kejadian Nyata Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap

No.	Kriteria	Uraian
1.	Existency/Validity	Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, yang ada di neraca (termasuk aset Sewa Guna Usaha) adalah dikuasai oleh Pemerintah, atau dikuasai pihak lain untuk Pemerintah.
2.	Completeness	Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, (termasuk aset Sewa Guna Usaha) yang dimiliki oleh Pemerintah, telah tercatat pada neraca tanpa kecuali.
3.	Valuation	Permasalahan yang dihadapi Pemerintah adalah masalah valuation. Saat ini Pemerintah sebagian besar masih berpedoman pada PP no.24 tahun 2005 sedangkan peraturan tersebut telah direvisi dengan PP no.71 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis akrual. Akuntansi Berbasis Akrual adalah pencatatan berdasarkan terjadinya transaksi, bukan berdasarkan keluar atau masuknya kas. PP no 71 tahun 2010 seharusnya sudah mulai diberlakukan terhitung mulai tahun 2010 lalu, akan tetapi karena masih kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi berbasis akrual maka balitbang kemendagri masih menggunakan akuntansi berbasis kas. Dalam perlakuannya untuk aktiva tetap, dua perlakuan akuntansi tersebut sangat berbeda karena nilai aktiva tetap selalu berkaitan dengan biaya penyusutannya. contoh kasus, apabila seorang KPA setuju untuk membeli mobil dinas pada oktober 2011 seharga Rp300.000.000 sedangkan pembayarannya dilakukan pada November 2011, sesuai dengan PSAK estimasi masa manfaat kendaraan bermotor adalah 5 tahun apabila menggunakan metode garis lurus, maka perlakuan akutansinya adalah:

		<p><u>akuntansi berbasis kas</u> pencatatan perolehan aktiva tetap bulan November 2011 (saat kas keluar dari bendahara) biaya dihitung sejak bulan November 2011 $(Rp300.000.000 \times 20\%) / 12 = Rp5.000.000 \times 2$ (Nov-Des) = Rp10.000.000 biaya yang dibayar ditahun 2011</p> <p><u>akuntansi berbasis akrual</u> pencatatan perolehan aktiva tetap bulan Oktober 2011 (saat transaksi berlangsung) biaya dihitung sejak bulan Oktober 2011 $(Rp300.000.000 \times 20\%) / 12 = Rp5.000.000 \times 3$ (Okt-Des) = Rp15.000.000 biaya yang dibayar ditahun 2011</p> <p>Sehingga terjadi selisih sebesar $Rp15.000.000 - Rp10.000.000 = Rp5.000.000$</p> <p>Selisih tersebutlah yang biasanya menjadi temuan/koreksi dari pengawas.</p> <p>Selain masalah valuation diatas, sebagian Pemerintah saat ini belum menghitung sendiri depresiasi penyusutan (saat ini masih dihitung oleh DJKN Kemenkeu). Apabila seluruh instansi Pemerintah mampu menghitung depresiasi penyusutannya sendiri, maka akan terlihat nilai aktiva saat ini dan aktiva-aktiva mana saja yang masih ada masa manfaatnya. Masa manfaat aktiva digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan penghapusan aktiva tetap (untuk aktiva yang masa manfaatnya telah habis dapat dihapuskan-PSAK). Masa manfaat aktiva yang telah habis dapat dihapuskan atau dijual. Apabila dijual maka hasil penjualannya dapat menambah kas Negara.</p>
4.	Right & Obligation	<p>Pemerintah mempunyai hak kepemilikan atas semua aset tetap yang tercatat pada neraca, dan bebas dari pembatasan dan penjaminan. Jika ada dapat teridentifikasi. Bila ada pembatasan asset (asset tetap yang dijadikan jaminan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan)</p>
5.	Classification & Disclosure	<p>Permasalahan dalam pelaporan aktiva tetap pada beberapa instansi Pemerintah adalah apabila waktu pelaporan aktiva mundur dari jadwal. Karena pencatatannya belum berupa system yang terintegrasi.</p> <p>Berdasarkan pengamatan/observasi, laporan aktiva tetap sebagian instansi Pemerintah telah memenuhi beberapa criteria aktiva tetap yaitu criteria existence/validity, completeness dan right/obligation. Sedangkan untuk criteria valuation dan disclosure masih terdapat beberapa masalah. Beberapa masalah tersebut adalah adalah tidak lengkapnya disclosure (pengungkapan) aktiva tetap sebagaimana telah diatur didalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) mengenai informasi penyusutan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Nilai penyusutan; 6. Metode penyusutan yang digunakan; 7. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 8. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

2. Completeness

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3. Valuation

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

4. Right & Obligation

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

5. Classification & Disclosure

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan: (a) Penambahan, (b) Pelepasan, (c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (d) Mutasi aset tetap lainnya.; (3) Informasi penyusutan, meliputi: (a) Nilai penyusutan; (b) Metode penyusutan yang digunakan; (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data

Tabel 2. Contoh Prosedur Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap

Tujuan dan Prosedur	NO. Tabel.	Ket.
Uji Detail Saldo		
1. Periksa kesesuaian saldo awal 1 Januari xxxx (awal tahun) sesuai dengan saldo audit 31 Desember tahun sebelumnya (yg telah audited), untuk memastikan semua koreksi audit tahun lalu telah dibukukan secara tepat dan akurat.	3.6	
Audit Objectives: EXISTENCY/VALIDITY <i>Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, yang ada di neraca (termasuk aset Sewa Guna Usaha) adalah dikuasai oleh Pemerintah, atau dikuasai pihak lain untuk pemerintah.</i>		
2. Buatlah rincian aset tetap dan skedul depresiasi sesuai dengan klasifikasi jenis aset tetap.	3.6	
3. Buatlah skedul penambahan aset selama tahun berjalan. Bandingkan penambahan dengan rencana tahunan (RAPBN).	3.3	
4. Untuk penambahan aset periksa dokumen pendukung (kontrak pembelian, SP2D) untuk mengecek biaya tercatat. Evaluasi perkiraan umur ekonomis yang diterapkan.	3.3	
5. Untuk pelepasan/penjualan aset periksa dokumen pendukung untuk memastikan jumlah yang diterima, dan jumlah nilai perolehan dan penyusutan yang dihapus dari buku besar. Hitung ulang kerugian atau pendapatan.	3.4	
Audit Objectives: COMPLETENESS <i>Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, (termasuk aset Sewa Guna Usaha) yang dimiliki oleh Pemerintah, telah tercatat pada neraca tanpa kecuali.</i>		
6. Periksa fisik aset tetap dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan telusuri keberadaan pencatatannya.	BAP/ KIB	
Audit Objectives: VALUATION <i>Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan dicatat dengan nilai yang layak (telah mengakui akumulasi penyusutan, deplesi, atau amortisasi). Nilai yang belum terdepresiasi diharapkan akan diterima Pemerintah di masa mendatang dari penggunaannya.</i>		
7. Lakukan prosedur analitis atau penghitungan ulang untuk menguji beban depresiasi/amortisasi dan samakan beban total dari daftar aset ke pos beban pada buku besar. (cocokkan penghitungan yang dilakukan oleh pengelola aktiva tetap dan bagian akuntansi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)	3.5	AD
Audit Objectives: RIGHT & OBLIGATION <i>Pemerintah mempunyai hak kepemilikan atas semua aset tetap yang tercatat pada neraca, dan bebas dari pembatasan dan penjaminan. Jika ada dapat teridentifikasi.</i>		
8. Buatlah konfirmasi Bank dan debitur, kemudian telaah notulen, perjanjian, dan dokumen lain untuk bukti jaminan, atau pembatasan aset tetap. Tentukan bahwa pengungkapan yang penting sudah dibuat.		
Audit Objectives: CLASSIFICATION & DISCLOSURE <i>Aset tetap dan akun terkait telah disajikan dengan layak, dijelaskan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan, dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.</i>		
9. Periksa kemungkinan penambahan aset tetap yang tidak layak, seperti biaya pemeliharaan, perbaikan yang dikapitalisasi.	3.3	AD

dilakukan dengan metode dokumentasi (telaah dokumen) dari sumber media cetak dan elektronik dan *Observation* (Pengamatan Langsung). Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan membandingkan Informasi dan dokumen yang didapat dengan keadaan yang ada di lapangan tentang objek yang diteliti.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis antara keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan (GAP) secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, mengkategorisasikan, membandingkan, menganalisis, mengevaluasi dan menginterpretasikannya untuk kemudian menarik kesimpulan yang logis. Dalam analisis tersebut digunakan bantuan tabel, gambar, chart dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kesenjangan antara Kenyataan dengan Keinginan

Dalam uraian diatas maka ditarik kesimpulan, kriteria yang harus dimiliki oleh aktiva tetap adalah:

1. *Existency/Validity*

Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, yang ada di neraca (termasuk aset Sewa Guna Usaha) adalah dikuasai oleh Pemerintah, atau dikuasai pihak lain untuk Pemerintah. Prosedur:

- Siapkan rincian aset tetap dan skedul depresiasi yang sesuai dengan klasifikasi jenis aset tetap. (Lihat Tabel 2)
- catat penambahan aset tetap selama tahun berjalan serta telah dicocokkan dengan rencana tahunan anggaran. (Lihat Tabel 2)
- Atas penambahan aset tetap selama tahun berjalan telah diperiksa ke dokumen pendukung seperti SP2D. (Lihat Tabel 2)
- Atas pelepasan dan penjualan aset tetap telah

Identifikasi Aspek untuk Mengatasi Kesenjangan

diperiksa kedokumen pendukung dan telah dilakukan penghitungan ulang untuk mengetahui laba atas penjualan aset tetap. (Lihat Tabel 2)

2. *Completeness*

Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, (termasuk aset Sewa Guna Usaha) yang dimiliki oleh Pemerintah, telah tercatat pada neraca tanpa kecuali. Prosedur:

Lakukan pemeriksaan fisik aset tetap dan telah terdapat BA Pemeriksaan Aset Tetap. (Lihat Tabel 2)

3. *Valuation*

Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan dicatat dengan nilai yang layak (telah mengakui akumulasi penyusutan, deplesi, atau amortisasi). Nilai yang belum terdepresiasi diharapkan akan diterima Pemerintah di masa mendatang dari penggunaannya. Prosedur:

Lakukan penghitungan untuk menguji beban depresiasi dan telah dicocokkan dengan saldo beban penyusutan. (Lihat Tabel 2)

4. *Right & Obligation*

Perusahaan mempunyai hak kepemilikan atas semua aset tetap yang tercatat pada neraca, dan bebas dari pembatasan dan penjaminan. Jika ada dapat teridentifikasi. Bila ada pembatasan aset (aset tetap yang dijadikan jaminan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan).

5. *Classification & Disclosure*

Aset tetap dan akun terkait telah disajikan dengan layak, dijelaskan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan, dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Prosedur:

Seluruh aset tetap disajikan dan diungkapkan dengan cukup (Lihat Tabel 2)

Keterangan atribut tes tabel 4:

- Terdapat permintaan dari bagian terkait yang

Tabel 4. Contoh Laporan Penambahan Aset Tetap

No	Bukti Jurnal			Keterangan	Atribut tes						
	No.	Tanggal	Nilai (dln Rp)		a	b	c	d	e	f	g
1.	Xxx	1/1/12	180.000.000	Mobil Dinas APV	√	√	√	√	√	√	√
2.	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	√	√	√	√	√	√	√
3.	Dst										

Tabel 5. Contoh Pelaporan Pengurangan Aset Tetap (dln jutaan Rupiah)

No	Bukti Jurnal			Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Jual	Laba (Rugi) Pelepasan Asset Tetap	Atribut tes			
	No	Tanggal	Nilai							a	b	c	d
1.	xx	1/5/2012	345	Furniture kantor	345	345	-	-	-	√	√	√	√
2.	xx	1/5/2012	100	Komputer dan printer	100	80	20	27	7	√	√	√	√

Tabel 6. Contoh Pelaporan Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku

Jenis aset	Tahun Perolehan	Nilai Aktiva Tetap tahun lalu			Nilai Perolehan Tahun ini	Nilai perolehan yang akan disusutkan	% penyusutan	Beban Penyusutan tahun ini	Akumulasi penyusutan tahun berjalan
		Nilai perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku					
1 Mobil Dinas APV	2 1/1/2012	3 -	4 -	5=3-4 -	6 180	7=3+6 180	8 20%	9=7 x 8 36	10=4+9 36
Mesin Genset Dst	1/1/2010	10	5	5		10	25%	2,5	7,5

Tabel 7. Contoh Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap

Keterangan	Saldo 1 Januari xxxx	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember xxxx
Harga Perolehan				
-Kendaraan bermotor	Xxx	xxx	xxx	xxx
-Peralatan & inventaris	Xxx	xxx	xxx	xxx
-Bangunan dan Tanah	Xxx	xxx	xxx	xxx
Sub Jumlah Harga Perolehan	Xxx	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan				
-Kendaraan bermotor	Xxx	xxx	xxx	xxx
-Peralatan & inventaris	Xxx	xxx	xxx	xxx
-Bangunan dan Tanah	Xxx	xxx	xxx	xxx
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan	Xxx	xxx	xxx	xxx
Nilai Buku	<u>XXX</u>			<u>XXX</u>

- membutuhkan penambahan aset tetap
- Terdapat persetujuan dari PPK dan bendahara pengeluaran atas penambahan aset tetap
 - Akurasi telah benar
 - Seluruh dokumen eksternal (Kuitansi, Faktur, Invoice atau Tagihan dari Rekanan) telah lengkap
 - Telah diklasifikasikan dengan benar
 - Telah sesuai dengan RAPBD

Keterangan Atribut tes tabel 5:

- Terdapat persetujuan dari Sekjen dan DJKN atas pelepasan aset tetap
- Telah tercatat didalam system aplikasi pada bagian Rumah Tangga dan system aplikasi pada bagian keuangan
- Akurasi telah benar
- Telah diklasifikasikan dengan benar

Untuk Pelaporan dan Pengungkapan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka nilai atas akumulasi dan beban penyusutan atas aktiva tetap wajib untuk diungkapkan.

SIMPULAN

Laporan Aktiva Tetap yang dibuat saat ini adalah laporan yang dihasilkan dari sistem yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, sistem tersebut

bernama SIMAK. Akan tetapi sejauh ini sistem tersebut belum mengakomodir keinginan pemeriksa. Sistem tersebut juga tidak mencantumkan keterangan mengenai biaya penyusutan, perhitungan biaya penyusutan hanya mengandalkan perhitungan dari DJKN (Ditjen Kekayaan Negara). Biaya penyusutan sangat penting pengungkapannya, karena ke depan Pemerintah diwajibkan untuk mengikuti PP no 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis accrual dan merupakan dasar penghapusan aktiva guna mewujudkan tertib pencatatan dan pengelolaan aktiva tetap. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah kurang maksimalnya gudang penyimpanan aktiva sehingga terdapat kasus aktiva rusak maupun hilang. Untuk membuat model pelaporan aktiva tetap yang ideal sebaiknya sesuai dengan PSAK dan SAP. Saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam hal penyajian pelaporan aktiva tetap untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah adalah:

- meningkatkan kualitas dan kuantitas pembuat laporan aktiva tetap dengan cara mengikutsertakan dalam program pelatihan/diklat untuk pengelolaan dan pelaporan aktiva tetap.
- membuat gudang yang ideal sebagai upaya pengamanan dan untuk lebih memudahkan pengoptimalan aktiva tetap tersebut.
- mengusulkan untuk membuat laporan aktiva tetap berdasarkan PSAK dan SAP, seperti

contoh format pelaporan aktiva tetap diatas (Tabel 2 s.d. 7) mempermudah dalam pencatatan dan menambah kas negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Hidayat, Alvin Reinanda (2009), *Masalah Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah*
- Siregar, Doli D. (2004), *Manajemen Aset*, Gramedia
- Scott, W. Richard (2001) *Institutions and Organizations, (Second Ed.)*, Sage Publication
- Robbins, Stephen and MaryCoulter (2007), *Management (Eight Ed.)*, NJ: Prentice Hall
- Oxford English Dictionary*
- Puslitbang Keuangan Daerah (2011), *Implementasi Manajemen Aset Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 17 tahun 2007*, Kementerian Dalam Negeri
- Komite Akuntan Indonesia (1994), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain*, Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia
- BPK-RI (2010), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010*.
<http://itjenKemendagri.go.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=25> , diakses 8 Maret 2012
- http://www.damandiri.or.id/file/abdwahidchairulahunair_bab2.pdf , diakses 10 Maret 2012
- Kompas (2010), *Pengelolaan Aset Daerah Lemah*
- Tempo Interaktif (2007), *DPRD Banten Pertanyakan Hilangnya Aset Daerah*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005, Lampiran IX, Pernyataan no.07, Akuntansi Aset Tetap
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, Lampiran I.01, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan BPK-RI No.01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).